

Roh Moo-hyun dan “Saemaul Undong”

Dede Kosasih*

“Saya tak punya muka lagi terhadap rakyat. Saya minta maaf telah mengecewakan Anda semua.”

Itulah pernyataan terakhir mendiang mantan Presiden Korea Selatan *Roh Moo-hyun* di depan publik, 30 April 2009, sebelum diperiksa jaksa penuntut umum.

Berita bunuh dirinya mantan Presiden Korea Selatan, Sabtu tanggal 23/5/09 di pagi hari itu sangat menghentak dunia dan mengguncang perasaan rakyat Korsel. Walaupun mantan presiden yang dirundung kasus korupsi ini meninggal dengan tragis, namun tetap dicintai dan masih menyisakan tempat bagi Roh di hati rakyat Korsel.

Kecintaan rakyat Korsel yang terpatri terhadap mendiang Roh itu bukan tanpa alasan. Setidaknya Roh telah membawa pemerintahannya dahulu relatif bersih. Namun kekaguman itu mulai dilunturkan dengan serangkaian tindak penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan Korsel, menyangkut dugaan tindak korupsi yang dilakukannya semasa Roh berkuasa.

Dakwaannya itu sangat membuatnya terpukul. Hal ini buntut dari pengakuan seorang pengusaha sepatu lokal Korsel terkemuka *Park Yeon-cha* yang mengatakan bahwa ia telah menyuap lusinan pejabat dan politisi, termasuk istri Roh ketika masih menjadi ibu negara. Namun demikian, Roh telah membantah tuduhan yang dia lakukan.

Roh hanya mengaku bahwa memang pengusaha sepatu terkemuka itu telah memberi istrinya uang senilai 1 juta dollar AS, tetapi itu bukan uang suap. Roh juga mengaku tahu, Park memberi 5 juta dollar AS lagi untuk kerabatnya, tetapi ia pikir itu investasi. Dan sampai akhir hayatnya pun tuduhan itu belum terbukti di depan hukum.

Namun yang menarik di balik peristiwa tragisnya kematian mantan presiden Korsel ini adalah praktik budaya malu dan tidak menimpakan kesalahan pada orang lain sebagai manifestasi dari salah satu prinsip *Saemaul Undong*. Hal ini terungkap dari catatan terakhir Roh yang ditemukan dalam komputernya: *“Jangan bersedih. Bukankah hidup dan mati itu bagian dari alam? Jangan menyesali atau menuduh siapapun. Ini memang nasib. Tolong kremasikan saya. Dan taruh di batu nisan kecil di dekat rumah saya. Saya sudah lama memikirkan itu.”*

Saemaul Undong itu merupakan cara pandang atau gerakan perubahan yang berlandaskan nilai-nilai kearifan tradisional (*local wisdom, local genius*) bangsa Korea, yang mencakup prinsip *rajin, mandiri* dan *kerja sama*.

Melalui prinsip *rajin* ini, rakyat Korsel ditempa untuk bekerja keras secara sungguh-sungguh. Sedangkan prinsip *mandiri*, mereka diajarkan untuk tidak tergantung kepada orang lain, tidak mengalihkan tanggung jawab (kesalahan) kepada orang lain. Implikasinya mereka menjadi sadar dan berani bertanggung jawab penuh atas keputusan-keputusan yang dibuat diri sendiri. Prinsip yang ketiga yaitu semangat *bekerja sama*, yang mendorong rakyat Korsel untuk senantiasa mengedepankan rasa saling percaya, rasa senasib sepenanggungan, saling berbagi sesama anggota masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka dengan meningkatkan perilaku kompetisi dan partisipasi yang sehat.

Atas dasar prinsip-prinsip itulah, berbagai masalah bangsa Korsel termasuk merajalelanya korupsi bisa ditangani dengan sukses.

Budaya Malu

Seiring dengan berkembangnya demokrasi di Korsel, meningkat pula rasa tanggung jawab publik para pejabat Korsel. Pengunduran diri (termasuk bunuh diri) pejabat publik karena malu dan melalaikan kewajibannya merupakan suatu hal yang lumrah dalam iklim demokrasi Korsel.

Pengunduran diri Perdana Menteri Lee Hae-chan pada awal bulan Maret 2006 yang lalu, terkait dengan skandal golf merupakan salah satu manifestasi dari *saemaul undong* prinsip kedua, yakni kemandirian orang Korea yang berani bertanggung jawab dengan tidak mengalihkan atau mengkambing-hitamkan orang lain. Sejak presiden Roh Moo-hyun dilantik

Februari 2003, bahkan sebelum itu, sedikitnya telah 30-an kasus pengunduran diri pejabat publik baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang berhasil dihimpun dari data radio Korea Internasional, *KBS World Radio*. Termasuk kasus baru yaitu rencana pengunduran diri PM Han Seung Soo dan seluruh jajaran menteri kabinet dalam pemerintahan Presiden Korsel yang baru Lee Myung-bak pada akhir tahun 2008, dalam merespon aksi protes anti pemerintah, terkait rencana impor daging sapi AS. Kasus ini merefleksikan peningkatan standar etika (berupa budaya malu dan tanggung jawab) yang diaplikasikan oleh pejabat pemerintah di Korsel. Maka tidak mengherankan jika pengadilan Korsel selama ini telah berulang kali menjatuhkan putusan bersalah bagi pejabat (pegawai) sipil atas dakwaan suap/korupsi karena terbukti, tanpa pandang bulu.

Itulah barangkali buah kekaguman dan kenangan yang terus terpatri dalam sanubari rakyat Korsel atas komitmen dari Roh Moo-hyun, ketika membuka era dalam menciptakan budaya politik yang bersih, walaupun akhirnya komitmen itu jadi bumerang bagi dirinya.

Bagaimana dengan Wajah Bangsa Kita?

Lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya adalah ungkapan yang pas untuk menggambarkan kondisi bangsa Korsel dengan bangsa kita, Indonesia. Jika tanggung jawab publik dan tradisi malu sudah akrab dengan pejabat publik dan penguasa Korsel, lain halnya dengan pejabat publik Indonesia. Jarang sekali pejabat publik Indonesia mengundurkan diri (apalagi bunuh diri) sebagai ekspresi dari rasa malu dan bentuk pertanggungjawaban karena lalai dalam menjalankan tugas. Kontrasnya, pejabat publik Indonesia lebih sering mati-matian mempertahankan jabatannya dan sebisa mungkin menutupi kesalahannya.

Perbedaan antara pejabat Korsel dan Indonesia itu antara lain disebabkan oleh perbedaan kesadaran akan tanggung jawab publik yang disandang seseorang ketika ia memegang jabatan publik. Pejabat Korsel menganggap bahwa jabatan melahirkan tanggung jawab yang besar kepada masyarakat. Kesadaran itu kemudian mendorong pejabat Korsel untuk meletakkan jabatannya bila mereka gagal melaksanakan tanggung jawab tersebut atau melalaikannya. Tidak hanya tanggung jawab terhadap tugas, tetapi juga tanggung jawab moral. Sedangkan pejabat Indonesia tampaknya belum memiliki kesadaran serupa. Bagi pejabat Indonesia sementara ini, jabatan publik tidak memiliki konsekuensi apa pun terhadap tanggung jawabnya kepada masyarakat.

**Lektor Kepala pada Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah FPBS UPI*